

**RENCANA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI MALUKU**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani pada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Tahun 2024, bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pelaksanaan rencana kerja yang merupakan suatu komitmen bersama yang akan dipertanggung-jawabkan sebagai evaluasi keseluruhan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas.

### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku periode 2024 disusun berdasarkan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 12) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
  - 13) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah;
  - 14) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola dasar Perkembangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2001 – 2005.
  - 15) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; dan
  - 16) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah :**

1. Maksud adalah untuk menjabarkan kebijakan umum strategi pembangunan daerah yang menjamin adanya keterpaduan strategi, arah kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Maluku tahun 2019-2024.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga serasi dan selaras sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, baik dalam kebijaksanaan umum maupun strategi.
3. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
4. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.

#### **B. Adapun tujuannya adalah :**

1. Menciptakan sinergitas perencanaan program/kegiatan, perumusan dan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahunan berikutnya.
3. Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan salah satu bagian dari lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Provinsi Maluku yang mempunyai salah satu fungsi untuk menunjang pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku rata-rata di atas 94,3% bahkan pada beberapa kegiatan mencapai 100%. Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022.

**1. Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 94%.
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 95,3%.
- c) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 90,3%.

**2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

- a) Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 92%.

- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 83,3%.
- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 85%.

### **3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,3%.
- b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 96,3%.

### **4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 94%.

### **5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

- a) Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

- Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 97,4%
- b) Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 93%.
  - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 61%.
  - d) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 70,3%.

## **6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,5%
- d) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- e) Penyediaan Bahan Logistik kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9 %
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%.
- h) Fasilitasi kunjungan tamu terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.
- i) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,5%
- j) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%

- k) Pengadaan Mebel terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- l) Penyediaan jasa surat menyurat terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- m) Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.
- n) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- o) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- p) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.

Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebagaimana terlihat di atas.

**Tabel T-C.29**  
**Evaluasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022**

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (11/4)		
8		<b>Wajib</b>										
8	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
8	01	01	<b>Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	100	100	100	100	100			
8	01	01	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	6	6	100	6	12

8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	6	6	100	6	12	
8	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35	35	100	35	70	
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD				0	0	0	0	35		
8	01	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15	15	100	2	17	
8	01	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8	8	100	11		
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				73	73	100	66		
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5	5	100	4		

8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	100	1		
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1	100	1		
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25	25	100	16		
8	01	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
8	01	01	1.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			6	6	100	0		
8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			7	7	100	0		
8	01	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	100	1		
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2	2	100	1		
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	12	100	12		



8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			9	9	100	3		
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			4	4	100	5		
8	01	03			<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Presentase Kualitas Demokrasi		100	100	100	100	100		

8	01	03	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>									
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			5	5	100	1		

8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			5	5	100	5		
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			5	5	100	3		
8	01	04			<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Presentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100		

8	01	04	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>									
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			7	7	100	6		
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			8	8	100	3		
8	01	05			<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	Presentase Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama		100	100	100	100	100		
8	01	05	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>									

8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			8	8	100	2		
8	01	06			<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	-Presentase Konflik yang tertangani -Presentase Tindak Kriminalitas yang tertangani		100	100	100	100	100		
8	01	06	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>									

8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			5	5	100	3		
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			6	6	100	4		

8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			4	4	100	4		
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			2	2	100	1		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Penghitungan evaluasi kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator program/kegiatan, berdasarkan klasifikasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian sesuai format Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 s/d 2024.

### a. Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk memantapkan Wawasan Kebangsaan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya memberi pemahaman keprda masyarakat mengenai wawasan kebangsaan perlu dilakukan mengingat semangat kebangsaan yang mulai luntur di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat diharapkan memiliki rasa cinta kepada negara dan bangsa di semua aspek kehidupan sehingga ketahanan bangsa terhadap berbagai macam ancaman dan gangguan dari dalam maupun dari luar mampu ditangkal. Program ini meliputi 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang meliputi:
  - Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Empat Konsensus Dasar Berbangsa dilaksanakan di 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dengan jumlah peserta 75 orang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar berbangsa.
  - Kegiatan Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Kebangsaan yang dilaksanakan di 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan kabupaten Buru Selatan yang mengikutsertakan 30 Orang dengan tujuan meningkatkan rasa cinta tanah air melalui penguatan program gerakan nasional revolusi mental di daerah
  - Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di kabupaten seram Bagian Barat mengikutsertakan 30 orang dengan tujuan untuk

meningkatkan rasa cinta tanah air melalui kesadaran dan pemahaman warga negara tentang wawasan kebangsaan.

- Kegiatan Zikir dan Doa Bersama membangun Indonesia dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-77 dan HUT Provinsi Maluku ke-77 Tahun 2022 di Kota Ambon mengikutsertakan 1000 orang dari jajaran ASN, TNI Polri dan Organisasi Masyarakat dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme rasa cinta tanah air.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang meliputi :
- kegiatan forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah dan Buru Selatan
  - Koordinasi di Kalimantan Tengah dan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengikutsertakan 50 orang yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Menyediakan rekomendasi penelitian kepada masyarakat peneliti (mahasiswa, peneliti dalam negeri, peneliti asing dan organisasi masyarakat lainnya).
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dilaksanakan di Kota Tual dan Kabupaten Buru dengan tujuan memperkuat data dan informasi terkait pembentukan forum-forum strategis di bidang pembinaan ideologi di daerah.

Kegiatan tersebut diatas menghasilkan kinerja yang memuaskan, dengan capaian input sebesar 100% dan output sebesar 94%.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan Politik bagi masyarakat yang diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik yaitu
  - kegiatan Penelitian Pemberkasan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol di Provinsi Maluku dilaksanakan di Kota Ambon dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku.
  - Kegiatan sosialisasi Etika Politik yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara yang mengikutsertakan 75 orang dengan tujuan memberikan Pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik dilaksanakan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Tujuan Melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Pokja IDI.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seran Bagian Timur. Tujuannya adalah memonitor dan menginventarisir data base laporan partai politik di Provinsi Maluku.

Program pendidikan politik bagi masyarakat menghasilkan kinerja yang cukup memuaskan dengan input 100% dan output 91%.

#### **c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan cara pandang antar Pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan Organisasi kemasyarakatan di daerah yang diimplementasikan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yaitu
  - Kegiatan Forum Dialog bersama Pemda dan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama yang dilaksanakan di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur. Tujuannya adalah membangun harmonisasi antara Pemda dengan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mengisi pembangunan demokrasi di daerah Maluku.
  - Kegiatan tim terpadu Pengawasan Ormas yang dilaksanakan di Kota Ambon. Tujuannya adalah mengawasi ormas yang ada di Maluku.
  - Hibah Ormas dilaksanakan di Kota Ambon dimana tujuannya memberikan bantuan dana dari Pemda kepada Ormas yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Daya dimana tujuannya untuk mensinkronkan data Ormas dari Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut diatas mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 98%.

**d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**

Program ini bertujuan terbentuknya pola pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan pemahaman terhadap pencegahan penyalahgunaan

narkotia pada masyarakat yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yaitu melaksanakan Sosialisasi P4GN di Buru Selatan dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Maluku Barat Daya dengan tujuan adalah membangun koordinasi dan kolaborasi lintas Instansi terkait P4GN dan FKUB, Membangun Hubungan Harmonis antar umat beragama serta dikalangan Pemuda dan Pelajar sehingga terjadi kerukunan dan kedamaian masyarakat di Provinsi Maluku.

Kegiatan tersebut diatas mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 94%.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif bagi kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelayanan tugas-tugas Kemasyarakatan yang diimplementasikan melalui 4 (empat) kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengikutsertakan sebanyak 50 orang dari unsur masyarakat, pelajar dan mahasiswa di per Kabupaten di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabuapten Buru Selatan dan Kota Tual tujuannya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan pemahaman bahaya akan paham radikalisme dikalangan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Inventarisasi Data Konflik. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan di Jakarta dalam rangka evaluasi pelaporan target (B04, B08, B12) dan Rakornas PKS. Sedangkan kegiatan Inventarisasi Data Konflik yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara. Kegiatan konsultasi dan koordinasi pada 4 (empat) kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang rukun aman, damai dan kondusif.

- 3) Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang akurat terkait permasalahan-permasalahan yang mengganggu kerawanan di masyarakat sehingga menjadi bahan masukan untuk Pimpinan sebagai solusi penanganannya.
- 4) Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan tujuan membangun koordinasi dan sinergitas antar Pimpinan Daerah dalam upaya pemantapan Kamtibmas di Maluku.

Kegiatan tersebut diatas mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 87,1 %

#### **f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Untuk memperlancar rutinitas perkantoran guna pencapaian visi, misi dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, harus ditunjang dengan penyediaan jasa dan kebutuhan lainnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terbagi dalam 7 (Tujuh) kegiatan yakni :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku melalui mengikutsertakan pegawai dalam rangka mengikuti sosialisasi atau Bimtek di Kota Ambon dan di luar daerah, hal ini sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan diklat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan melalui penyediaan 2 (dua) unit komputer dan 6 (enam) unit laptop. Indikatornya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan bagi pelayanan kantor.
  - b. Penyediaan Bahan Logistik kantor yang dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan beberapa jenis Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutinitas kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
  - c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencetakan sampul surat dan foto copy bahan bahan rutinitas kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Indikatornya adalah terpenuhinya sampul surat yang dicetak dan bahan-bahan rutinitas kantor lainnya yang diperbanyak/dicopy.
  - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana informasi berupa surat kabar dan buku peraturan perundang

undangan, indikatornya adalah untuk mengetahui perkembangan informasi serta regulasi yang ada.

- e. Fasilitasi kunjungan tamu yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat rapat kedinasan serta pelayanan bagi tamu, indikatornya adalah terlayannya makan dan minum bagi tamu serta rapat rapat kedinasan.
  - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi maupun konsultasi ke pusat, indikatornya adalah terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan ini juga dilaksanakan di 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kegiatan konsultasi di 11 (Sebelas) kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mensinergikan program dan kegiatan dibidang kesatuan Bangsa dan Politik secara terarah dan terintegrasi.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dilaksanakan berupa 5 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda empat dengan indicator Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan Mebel berupan 20 kursi kerja, 1 set kursi tamu, 22 meja kerja, 5 filling cabinet, 1 rak arsip, 3 lemari arsip, 1 brangkas dengan indicator Jumlah jenis mebel kantor
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan berupa penyediaan meterai dan perangko serta benda pos lainnya, indikatornya adalah tertanganinya pertanggungjawaban keuangan dan pengiriman jasa surat menyurat.
  - b. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan berupa penyediaan dana untuk pembayaran tagihan telepon/internet (wifi) yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku,

indikatornya adalah terpenuhinya pembayaran rekening jasa telepon/internet (*wifi*) selama 1 (satu) tahun.

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan alat-alat kebersihan kantor, indikatornya adalah terpenuhinya ruangan kantor yang bersih nyaman dan terawat.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa service bagi kendaraan roda empat 1 (Satu) unit selama satu tahun, dan belanja penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar bagi kendaraan roda dua 5 (lima) unit. Indikatornya adalah terawatnya sarana operasional bagi pelayanan kantor.
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya dilaksanakan berupa belanja perawatan perlengkapan kantor terhadap 2 (dua) unit komputer dan laptop 6 (enam) unit. Indikatornya adalah terawatnya sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan tersebut diatas menghasilkan kinerja yang memuaskan, dengan capaian input sebesar 100% dan output sebesar 99,9%.

**Tabel T-C.30**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Presentase Kualitas Demokrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presentase Konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presentase Tindak Kriminalitas yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presentase Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### **Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas :**

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dipengaruhi oleh :

- a) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi masalah masalah Kantrantibmas.
- b) Semakin berperannya tokoh masyarakat dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat;
- c) Makin terbukanya komunikasi antar infra dan supra struktur politik;
- d) Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- e) Makin meningkatnya kepedulian organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat;
- f) Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai budaya nasional;
- g) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Kendati begitu, pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Masih teridentifikasinya sejumlah persoalan dan isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan mengemukakan situasi dan kondisi khusus seperti ancaman terorisme dan kesiapan pelaksanaan pileg, pilpres dan pilkada pada wilayah Provinsi Maluku dianggap menjadi penghambat pencapaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik , sebagai berikut :

### **Faktor penghambat pelaksanaan tugas.**

- a) Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi
- b) Kehadiran banyak partai politik di sisi lain dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan bangsa sehingga muncul pergeseran sikap yang bisa mempengaruhi proses demokrasi yang berlangsung.
- c) Kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk tindakan provokatif, hujatan serta prasangka dan kecurangan lainnya menunjukkan perilaku masyarakat yang belum berdemokrasi secara dewasa dimana ini menjadi tantangan yang serius dalam menuntaskan agenda reformasi.
- d) Adanya fenomena disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, dalam mengatasi sejumlah persoalan diatas, dan guna mengantisipasi permasalahan yang sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil langkah langkah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi secara mendalam program yang belum maksimal pencapaiannya untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Perencanaan yang lebih realistis dalam menentukan target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan yang ada.
3. Menempuh sejumlah langkah dan tindakan dalam mengembangkan kebijakan politik nasional baik kepada aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik linmas maupun terhadap organisasi politik ataupun ormas/LSM.
4. Melakukan pemantauan secara terpadu serta melarang kegiatan kelompok kemasyarakatan yang meresahkan ditengah masyarakat guna menjamin Kantrantibmas.
5. Dapat menganggarkan dana guna mendukung kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan.
6. Memaksimalkan kinerja dan koordinasi terkait pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, *Non Government Organization* (NGO) dan lembaga asing di daerah.

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Demokrasi, Keamanan, Ketertiban dan Kualitas Perdamaian</b>							
<b>Wajib</b>							
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>							
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pemerintahan selama 1 (satu) tahun</b>			<b>3.199.327.236</b>	<b>3.187.216.076</b>	<b>99,7</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>51,753,129</b>	<b>51,719,294</b>	<b>99,9</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel	6 Dokumen	6 dokumen	33,450,000	33,450,000	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang akuntabel	6 Dokumen	6 dokumen	18,303,129	18,269,294	99,9	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>431.478.300</b>	<b>424.979.952</b>	<b>98,5</b>	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	Terakomodirnya ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.	12 bulan	12 bulan	431.478.300	424.979.952	98,5	

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.462.421.625</b>	<b>1.457.129.930</b>	<b>97</b>	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan penunjang dan kebutuhan kantor	12 bulan	12 bulan	169.719.000	169.719.000	100	
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	77.051.255	76.990.455	99,9	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	58.293.900	58.269.900	99,9	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	8.640.000	8.640.000	100	
Fasilitas kunjungan tamu	Terfasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	87.785.200	87.779.600	99,9	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan badan	12 bulan	12 bulan	1.060.932.270	1,055,730,975	99,6	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>695.422.117</b>	<b>695.233.175</b>	<b>99,9</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda empat	5 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda empat	542.810.750	542.810.750	100	
Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor	20 kursi kerja, 1 set kursi tamu, 22 meja kerja, 5 filling cabinet, 1 rak arsip, 3	20 kursi kerja, 1 set kursi tamu, 22 meja kerja, 5 filling cabinet, 1 rak arsip, 3	152.611.367	152.422.425	99,9	

		lemari arsip, 1 brangkas	lemari arsip, 1 brangkas				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>459.396.265</b>	<b>459.376.975</b>	<b>99,9</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya pelayanan surat menyurat	12 bulan	12 bulan	3.000.000	2.999.000	99,9	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	27.712.000	27.694.546	99,9	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	428.684.265	428.683.429	99,9	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>98.855.800</b>	<b>98.776.750</b>	<b>99,9</b>	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	3 Unit	3 Unit	70.530.800	70.471.750	99,9	
Pemeliharaan/Rehabilitasi saran dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan operasional kantor	2 Paket	2 Paket	28.325.000	28.305.000	99,9	
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>1.864.711.591</b>	<b>1.752.743.698</b>	<b>94</b>	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan nilai-nilai Konsensus Dasar, Pembumian Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Kab./Kota	Kab./Kota	1.388.223.861	1.301.989.078	94	

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terkoordinasinya Dewan Pembina FPK serta meningkatnya peran komunitas masyarakat dalam rangka kesadaran bela negara	Kab./Kota	Kab./Kota	408.738.110	389.552.000	95,3	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Data Laporan Potensi Gangguan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kab./Kota	Kab./Kota	67.749.620	61.202.620	90,3	
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Peningkatan Peran Partai Politik dalam pengembangan Etika dan Budaya Politik</b>			4.017.651.207	3.640.823.205	91	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya politik serta terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik Provinsi Maluku dan penyerahan hibah kepada ormas	Kab./ Kota	Kab./ Kota	3.517.260.760	3.220.222.710	92	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik			221.386.932	184.440.000	83,3	

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya database partai politik Provinsi Maluku	Partai Politik	Kab./ Kota	279.003.515	236.160.495	85	
<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik Dalam Masyarakat</b>			<b>488.816.431</b>	<b>476.600.721</b>	<b>98</b>	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya kesamaan cara pandang antara Pemda dengan Ormas dalam rangka Pemberdayaan dan pembinaan Ormas di Daerah	Kab./ Kota	Kab./ Kota	300.160.711	294.973.121	98,3	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya database ormas, LSM, LNL di Provinsi Maluku	Ormas, Partai Politik	Ormas Partai Politik	188.655.720	181.627.600	96,3	
<b>Program Peminaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik Dalam Masyarakat</b>			<b>156.038.140</b>	<b>146.509.449</b>	<b>94</b>	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya Sinergitas Tim Terpadu P4GN serta meningkatnya peran FKUB dalam kehidupan umat beragama	Kab/Kota	Kab/Kota	156.038.140	146.509.449	94	

<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik Dalam Masyarakat</b>			833.594.520	754.637.981	91	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya menjaga Kantramtibmas serta bahaya Paham Radikalisme	Kab./ Kota	Kab./ Kota	211.383.020	205,852,210	97,4	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Keterpaduan dan sinergi dalam Pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu	11 Partai Politik	11 Partai Politik	384.391.796	357,351,436	93	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya data dan informasi potensi konflik dan keberadaan orang asing di Daerah	1 Buah Dokumen	1 Buah Dokumen	49.999.769	30.460.000	61	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terwujudnya koordinasi lintas pimpinan daerah	6 Laporan	6 Laporan	187.819.935	132,130,335	70,3	
<b>J U M L A H</b>				<b>10,560,139,125</b>	<b>9,929,687,130</b>	<b>94,0</b>	

**TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN 2023**

TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023		
	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Realisasi
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,999,700	49,999,700	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49,999,700	49,999,700	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,999,790	99,999,790	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,999,790	99,999,790	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43,469,500	43,469,500	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43,469,500	43,469,500	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	391,900,700	391,900,700	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,750,000	48,750,000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,999,500	34,999,500	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000	25,000,000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,760,000	5,760,000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	50,000,000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227,391,200	227,391,200	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>496,718,348</b>	<b>496,718,348</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,000,000	72,000,000	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422,718,348	422,718,348	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92,264,500</b>	<b>92,264,500</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,464,500	86,464,500	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,800,000	5,800,000	100

<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,623,997,572	2,623,997,572	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2,286,380,782	2,286,380,782	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	237,616,840	237,616,840	100
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99,999,950	99,999,950	100
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Penempatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<b>10,633,774,885</b>	<b>10,633,774,885</b>	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10,332,195,350	10,332,195,350	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	225,106,659	225,106,659	100
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	76,472,876	76,472,876	100
<b>Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>			100
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1,376,751,745	1,376,751,745	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1,276,787,145	1,276,787,145	100
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,	99,964,600	99,964,600	100

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
<b>Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya</b>			
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95,617,782	95,617,782	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	95,617,782	95,617,782	100
<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas fasilitas penanganan konflik sosial</b>			
Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	468,033,210	468,033,210	100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	147,886,300	147,886,300	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	215,328,400	215,328,400	100
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55,504,910	55,504,910	100
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	49,313,600	49,313,600	100

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan system dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah.

Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan system politik demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan. Kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

### **2.3 a. Tugas dan Fungsi**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku yang merupakan lembaga teknis daerah Provinsi Maluku, dalam penyusunan rencana program tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku 2019-2024 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
- g) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut melalui susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
  3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
  2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Penanganan Konflik.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.3.b Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

#### **a. *Kondisi Umum***

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi bagi kelangsungan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kemajemukan atas perbedaan berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, struktur wilayah dalam wilayah NKRI. Hal ini memungkinkan akan rawan konflik social, keamanan, ketertiban, politik, ideologi, dan ekonomi yang dapat mengarah pada konflik vertikal dan horizontal.

Pelaksanaan pembangunan yang terpusat dan tidak merata ternyata telah memicu akan munculnya konflik sosial. Menguatnya gejala disintegrasi bangsa seperti terjadi pada akhir-akhir ini dalam bangsa kita.

Pembangunan nasional di daerah sejauh ini masih memerlukan perhatian serius, karena permasalahan pembangunan ini banyak mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya kemajuan iptek sehingga tuntutan terhadap kemajuan pembangunan selalu menimbulkan permasalahan seiring dengan perkembangan kemajuan tersebut. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang diharapkan akan dapat saling menopang guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Akhir-akhir ini perkembangan sistem politik yang demokratis telah berjalan sedemikian rupa baik pada pemerintahan maupun pada masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan banyaknya bermunculan partai politik, dengan menaruh harapan bagi masyarakat bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate. Namun, pemerintahan yang terbentuk pun dinilai masyarakat belum mampu mengatasi masalah-masalah bangsa, sehingga munculnya pergeseran sikap yang semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah

Bidang ekonomi adalah bidang yang paling terdampak dengan adanya covid 19. Pasca ditetapkan new normal setelah masa pandemi, maka bidang ekonomi sedikit mengalami kemajuan tetapi masih sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena perputaran ekonomi belum mengalami kemajuan.

Bidang kamtibmas juga mengalami kenaikan yang signifikan. tingginya angka kriminalitas sangat mempengaruhi aktivitas orang-orang dalam menjalankan aktivitas. Kondisi keamanan sangat mempengaruhi

**b. Kondisi Obyektif**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah instansi pemerintah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini merupakan komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan kesatuan bangsa yang memfasilitasi pengembangan system politik yang demokratis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dewasa ini akan dihapuskan

pada tantangan tugas yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut diatas, juga terdapatnya beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan tugas pokok dan fungsi .

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah factor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian terdapat juga momentum strategis, dimana terdapat factor positif yang dapat digunakan sebagai kekuatan signifikan yang mampu mendorong peningkatan kinerja.

### **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :**

#### **a. Kondisi politik :**

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
- Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
- Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
- Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

#### **b. Kondisi Sosial:**

- Kemajuan teknologi menyebabkan keterbukaan informasi. Tingginya pengguna media sosial berimplikasi kepada keterbukaan informasi yang tidak terbandung. Berbagai isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah dan hal-hal yang mengarah pada perpecahan bangsa berimplikasi pada terjadinya degradasi terhadap *sense of belongingness* (Rasa memiliki) terhadap tanah air.
- Arus informasi yang tidak tersaring dengan baik membuat berbagai isu rasialisme mengemuka ke ruang publik. Fanstisme yang berlebihan terhadap suku dan agama membulkan persatuan dan kesatuan yang semu. Implikasinya sedikit pemicu yang dilakukan oleh

orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan aksi anarkis dari kelompok-kelompok militan.

**c. Kondisi Ekonomi :**

- Terdapat disparitas sosial yang lebar antara kelompok ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi menengah di masyarakat.
- Daerah belum mampu mengelola PAD dengan maksimal, sehingga banyak potensi daerah belum diolah dan dikelola untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
- Banyak sektor jasa melakukan rasionalisasi tenaga kerja, atau menutup usahanya. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran dalam beberapa bulan terakhir.
- Banyak TKW yang bekerja di luar negeri mengalami dampak covid yang terjadi secara global. Banyak TKW pulang ke Indonesia karena kebijakan rasionalisasi yang dilakukan di negara masing-masing. Kehadiran TKW dalam jumlah besar berdampak pada makin beratnya beban ekonomi pemerintah.

**d. Kondisi Keamanan dan Ketentraman :**

- Era keterbukaan informasi berimplikasi pada meningkatnya fenomena politik identitas di masyarakat. Kelompok tertentu berusaha membawa identitas seperti agama, ras dan kelas sosial untuk mengatasi ketidakadilan yang diterima oleh suatu kelompok. Kondisi ini yang selalu menjadi pemicu konflik vertikal dan horisontal.
- Rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Pandemi Covid 19 membuat masyarakat terkonsentrasi di ruang-ruang privat, hal ini menyebabkan rendahnya frekwensi persingungan masyarakat, namun kondisi perekonomian yang melemah membuat angka kriminalitas tetap terjadi seperti pencurian, perampokan dan penjam-bretan.

**Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja**

**a. Kondisi Politik :**

- Frekwensi komunikasi politik yang terjalin antara infra struktur dan supra struktur politik dalam sistim politik multi partai saat ini, mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu indikasinya adalah

terksposnya banyak hal yang berkaitan dengan relasi 2 ( dua komponen) ini. Era keterbukaan informasi menjadikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan kepentingan publik menjadi konsumsi umum.

- Lembaga legislatif saat ini berperan penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola penyampaian aspirasi yang cenderung terbuka dan langsung. Baik dalam forum-forum resmi OPD, Forum legislatif maupun "parlemen jalanan" yang ditungangi oleh mahasiswa dan ormas-ormas.
- Tingkat partisipasi politik masyarakat yang semakin baik, Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi masyarakat dalam tahapan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara berjenjang, seperti sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat serta penghitungan cepat hasil penghitungan sementara.
- Ormas adalah perwujudan masyarakat sipil yang berfungsi untuk menjembatani , memperjuangkan kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Ormas dengan kekuatan kolektivitas dan kemampuan yang terorganisir saat ini telah meningkatkan perannya untuk mengawasi dan terlibat aktif dalam kebijakan dan program pembangunan demi kepentingan publik.

**b. Kondisi Sosial Budaya :**

- Terbukanya kesempatan untuk pengembangan budaya lokal seperti nilai sosial, nilai agama, nilai budaya yang dimiliki oleh daerah sebagai salah satu upaya melestarikan nilai-nilai tradisional dsebagai aset budaya nasional.
- Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
- Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
- Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

**c. Kondisi Ekonomi :**

- Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.

- Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
- Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
- Kondisi geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya adalah laut menjadikan Maluku memiliki potensi yang besar.
- Secara Geografis, Wilayah Maluku berbatasan dengan provinsi lain, menjadikannya begitu strategis dan kaya sumber daya alam terutama sumber daya laut.

**d. Kondisi Keamanan/Ketentraman :**

- Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
- Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
- Terakomodasinya potensi satuan linmas dalam pembangunan demokrasi dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

**Program dan Kegiatan Prioritas  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku**

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja Pada Akhi Periode RPJMD	
			2023		2024		K	Rp
			K	Rp	K	Rp		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Koordinasi Dan Pelaksanaan System Informasi Kepegawaian	CC	B	9,232,000,000	B	9,629,000,000	B	40,919,000,000
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Tanah Air	100%	100%	1,090,000,0*****00	100%	1,225,000,000	100%	4,664,500,000
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Kualitas Demokrasi	55.62		5,300,000,000	100%	6,150,000,000	100%	22,790,000,000
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Tanah Air	100%	100%	1,150,000,000	100%	1,200,000,000	100%	4,006,000,000

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Meningkatnya Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Umat Beragama	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,500,000,000	100%	4,000,000,000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Konflik Yang Tertangani	100%	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	2,200,000,000
	Presentase Tindak Kriminalitas Yang Tertangani							

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2023 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan.

**Tabel T-C.31**  
**Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ambon	Tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel	8 Dokumen	49,999,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ambon	Tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel	8 Dokumen	100,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Ambon	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang akuntabel	6 Dokumen	100,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Terakomodirnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,128,102,669	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Terakomodirnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	5,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Ambon	tersusunanya laporan keuangan		99,999,790	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Ambon	tersusunanya laporan keuangan		100,000,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ambon	Tersusunnya data administrasi ASN			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ambon	Tersusunnya data administrasi ASN	45 Orang	50,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terakomodirnya ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	40 Orang	43,469,500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terakomodirnya ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	40 Orang	150,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ambon	Terakomodirnya pakaian dinas dan atribut kelengkapan ASN			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ambon	Terakomodirnya pakaian dinas dan atribut kelengkapan ASN	45 Orang	200,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ambon	Tersedianya peralatan penunjang kebutuhan kantor (6 laptop, 6 printer, 6 AC)		48,750,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ambon	Tersedianya peralatan penunjang kebutuhan kantor (6 laptop, 6 printer, 6 AC)	18 Unit	250,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	34,999,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	150,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	100,000,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ambon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,760,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ambon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Terfasilitasinya kebutuhan tamu	12 Bulan	50,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Terfasilitasinya kebutuhan tamu	12 Bulan	300,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kabuapten Kota, Jakarta	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Badan	12 Bulan	227,391,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kabuapten Kota, Jakarta	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Badan	12 Bulan	1,200,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Ambon	Tersedianya kendaraan dinas penunjang kebutuhan kantor			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Ambon	Tersedianya kendaraan dinas penunjang kebutuhan kantor	9 Unit	300,000,000	
	Pengadaan Mebel	Ambon	Tersedianya mebel penunjang kebutuhan kantor			Pengadaan Mebel	Ambon	Tersedianya mebel penunjang kebutuhan kantor	1 Paket	200,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	10,000,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	72,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	75,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	422,718,348	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	400,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor		86,464,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	18 Unit	300,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ambon	Terpeliharanya peralatan operasional kantor		5,800,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ambon	Terpeliharanya peralatan operasional kantor	10 Unit	75,000,000	
<b>2</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan</b>					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter</b>					

	Karakter Kebangsaan					Kebangsaan					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Buru, Bursel, SBT, Malra, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. MBD, KKT, Kab. Buru, SBB	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Konsensus Dasar, Pembumian Pancasila, wawasan kebangsaan, penguatan ketahanan ideologi serta terbentuknya tim gugus tugas GNRM Provinsi Maluku	Kab. Buru, Bursel, SBT, Malra, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. MBD, KKT, Kab. Buru, SBB	2,286,380,782	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Buru, Bursel, SBT, Malra, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. MBD, KKT, Kab. Buru, SBB	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Konsensus Dasar, Pembumian Pancasila, wawasan kebangsaan, penguatan ketahanan ideologi serta terbentuknya tim gugus tugas GNRM Provinsi Maluku	Kab. Buru, Bursel, SBT, Malra, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. MBD, KKT, Kab. Buru, SBB	3,830,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Malra, Kep. Aru, SBT Kab. Buru, Malteng, SBB, Kab. Buru, Malteng, SBB,	Terkoordinasinya Dewan Pembina FPK, meningkatnya peran komunitas masyarakat dalam rangka kesadaran bela negara serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi rumpun Melanesia-	Kab. Malra, Kep. Aru, SBT Kab. Buru, Malteng, SBB, Kab. Buru, Malteng, SBB,	237,616,840	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Malra, Kep. Aru, SBT Kab. Buru, Malteng, SBB, Kab. Buru, Malteng, SBB,	Terkoordinasinya Dewan Pembina FPK, meningkatnya peran komunitas masyarakat dalam rangka kesadaran bela negara serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi rumpun Melanesia-Indonesia	Kab. Malra, Kep. Aru, SBT Kab. Buru, Malteng, SBB, Kab. Buru, Malteng, SBB,	200,000,000	

			Indonesia								
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Kep. Aru , KKT, MBD	Tersedianya data laporan potensi gangguan ideologi dan wawasan kebangsaan	Kab. Kep. Aru , KKT, MBD	99,999,950	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Kep. Aru , KKT, MBD	Tersedianya data laporan potensi gangguan ideologi dan wawasan kebangsaan	Kab. Kep. Aru , KKT, MBD	100,000,000	
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>					<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>					

<p><b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b></p>					<p><b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b></p>					
<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Kab. Malra, Kota Tual, KKT,</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya politik serta terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan keuangan serta proses PAW kepada partai politik Provinsi</p>	<p>Kab. Malra, Kota Tual, KKT, 12 Partai Politik</p>	<p>10.633.774.885</p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Kab. Malra, Kota Tual, KKT,</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya politik serta terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan keuangan serta proses PAW kepada partai politik Provinsi Maluku</p>	<p>Kab. Malra, Kota Tual, KKT, 12 Partai Politik</p>	<p>3,100,000,000</p>	

			Maluku							
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Tersedianya Data Base Partai Politik Provinsi Maluku dan Tersedianya data monev implementasi kebijakan politik didaerah	2 Laporan	225,106,659	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Tersedianya Data Base Partai Politik Provinsi Maluku dan Tersedianya data monev implementasi kebijakan politik didaerah	2 Laporan	250,000,000

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel	Terlaksananya koordinasi antara Pemda dan parpol, pengukuran IDI, serta data laporan terkait permasalahan dibidang Poldagri	Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel, 1 laporan dan 1 dokumen	76,472,876	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel	Terlaksananya koordinasi antara Pemda dan parpol, pengukuran IDI, serta data laporan terkait permasalahan dibidang Poldagri	Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel, 1 laporan dan 1 dokumen	950,000,000	
4	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terwujudnya kesamaan cara pandang antara Pemda dengan ormas dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan ormas didaerah (forum dialog dan Timdu Ormas)	pertemuan dan 1 dokumen	1,276,787,145	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terwujudnya kesamaan cara pandang antara Pemda dengan ormas dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan ormas didaerah (forum dialog dan Timdu Ormas)	pertemuan dan 1 dokumen	5,100,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Tersedianya Database Ormas, LSM dan LNL di Provinsi Maluku	1 laporan	99,964,600	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Tersedianya Database Ormas, LSM dan LNL di Provinsi Maluku	1 laporan	75,000,000	
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>					<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Buru, Bursel, Kota Tual, KKT	Terciptanya sinergitas Tim Terpadu P4GN (penyusunan Ranperda), pemahaman masyarakat akan bahaya Narkotika serta meningkatnya peran FKUB dalam kehidupan umat beragama	1 dokumen dan Kab. Buru, Bursel, Kota Tual, KKT	95,617,782	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Buru, Bursel, Kota Tual, KKT	Terciptanya sinergitas Tim Terpadu P4GN (penyusunan Ranperda), pemahaman masyarakat akan bahaya Narkotika serta meningkatnya peran FKUB dalam kehidupan umat beragama	1 dokumen dan Kab. Buru, Bursel, Kota Tual, KKT	500,000,000	
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>					<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>					

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bursel, Malteng, Malra, KKT, Kab. Malra, Bursel, Malteng, MBD	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga Kantrantibmas serta bahaya paham radikalisme	Kab. Bursel, Malteng, Malra, KKT, Kab. Malra, Bursel, Malteng, MBD	147,886,300	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bursel, Malteng, Malra, KKT, Kab. Malra, Bursel, Malteng, MBD	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga Kantrantibmas serta bahaya paham radikalisme	Kab. Bursel, Malteng, Malra, KKT, Kab. Malra, Bursel, Malteng, MBD	500,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Kabuapten Kota, Jakarta	Meningkatnya koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial (PKS) serta mendeteksi potensi kerawanan yang terjadi	12 bulan	215,328,400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Kabuapten Kota, Jakarta	Meningkatnya koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial (PKS) serta mendeteksi potensi kerawanan yang terjadi	12 bulan	550,000,000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Meningkatnya koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial (PKS) serta mendeteksi potensi kerawanan yang terjadi	2 Dokumen	55,504,910	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Meningkatnya koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial (PKS) serta mendeteksi potensi kerawanan yang terjadi	2 Dokumen	200,000,000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Terwujudnya Koordinasi lintas Pimpinan Daerah	12 bulan	49,313,600	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Terwujudnya Koordinasi lintas Pimpinan Daerah	12 bulan	500,000,000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam penyusunan program dan kegiatan selalu berlandaskan hasil rumusan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan sekaligus memuat program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis dari SKPD.

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ambon	Tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel	8 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Ambon	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang akuntabel	6 Dokumen	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Terakomodirnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Ambon	tersusunnya laporan keuangan		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ambon	Tersusunnya data administrasi ASN	45 Orang	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terakomodirnya ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	40 Orang	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ambon	Terakomodirnya pakaian dinas dan atribut kelengkapan ASN	45 Orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ambon	Tersedianya peralatan penunjang kebutuhan kantor (6 laptop, 6 printer, 6 AC)	18 Unit	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ambon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Terfasilitasinya kebutuhan tamu	12 Bulan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kabupaten Kota, Jakarta	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Badan	12 Bulan	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Ambon	Tersedianya kendaraan dinas penunjang kebutuhan kantor	9 Unit	
Pengadaan Mebel	Ambon	Tersedianya mebel penunjang kebutuhan kantor	1 Paket	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	18 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ambon	Terpeliharanya peralatan operasional kantor	10 Unit	
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Buru, Bursel, SBT, Malra, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. MBD, KKT, Kab. Buru, SBB	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Konsensus Dasar, Pembumih Pancasila, wawasan kebangsaan, penguatan ketahanan ideologi serta terbentuknya tim gugus tugas GNRM Provinsi Maluku	Kab. Buru, Bursel, SBT, Malra, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. MBD, KKT, Kab. Buru, SBB	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Malra, Kep. Aru, SBT, Kab. Buru, Malteng, SBB, Kab. Buru, Malteng, SBB,	Terkoordinasinya Dewan Pembina FPK, meningkatnya peran komunitas masyarakat dalam rangka kesadaran bela negara serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi rumpun Melanesia-Indonesia	Kab. Malra, Kep. Aru, SBT, Kab. Buru, Malteng, SBB, Kab. Buru, Malteng, SBB,	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Kep. Aru, KKT, MBD	Tersedianya data laporan potensi gangguan ideologi dan wawasan kebangsaan	Kab. Kep. Aru, KKT, MBD	
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>				

<p><b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b></p>				
<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Kab. Malra, Kota Tual, KKT,</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya politik serta terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan keuangan serta proses PAW kepada partai politik Provinsi Maluku</p>	<p>Kab. Malra, Kota Tual, KKT, 12 Partai Politik</p>	
<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>		<p>Tersedianya Data Base Partai Politik Provinsi Maluku dan Tersedianya data monev implementasi kebijakan politik didaerah</p>	<p>2 Laporan</p>	

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel	Terlaksananya koordinasi antara Pemda dan parpol, pengukuran IDI, serta data laporan terkait permasalahan dibidang Poldagri	Kab. SBB, SBT, Malteng, Buru, Bursel, 1 llaporan dan 1 dokumen	
<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terwujudnya kesamaan cara pandang antara Pemda dengan ormas dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan ormas didaerah (forum dialog dan Timdu Ormas)	pertemuan dan 1 dokumen	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Tersedianya Database Ormas, LSM dan LNL di Provinsi Maluku	1 laporan	
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>				

<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Buru, Bursel, Kota Tual, KKT	Terciptanya sinergitas Tim Terpadu P4GN (penyusunan Ranperda), pemahaman masyarakat akan bahaya Narkotika serta meningkatnya peran FKUB dalam kehidupan umat beragama	1 dokumen dan Kab. Buru, Bursel, Kota Tual, KKT	
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>				
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bursel, Malteng, Malra, KKT, Kab. Malra, Bursel, Malteng, MBD	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga Kantrantibmas serta bahaya paham radikalisme	Kab. Bursel, Malteng, Malra, KKT, Kab. Malra, Bursel, Malteng, MBD	

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Kabuapten Kota, Jakarta	Meningkatnya koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial (PKS) serta mendeteksi potensi kerawanan yang terjadi	12 bulan	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Meningkatnya koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial (PKS) serta mendeteksi potensi kerawanan yang terjadi	2 Dokumen	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Terwujudnya Koordinasi lintas Pimpinan Daerah	12 bulan	

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN,**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tujuan rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah :

1. Terciptanya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang shantung dengan semakin memantapkan komunikasi politik antar supra struktur politik dan infrastruktur.
4. Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap Pluralitas

Sasaran rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah :

1. Menurunnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kerjasama lintas institusinol dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kriminalitas
2. Menumbuhkan kesadaran, prakarsa dan partisipasi masyarakat serta kerjasama lintas institusional untuk memelihara ketentraman dan keamanan wilayah
3. Terlaksananya Pemilu maupun Pemilukada secara jujur, adil, aman dan demokratis.
4. Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

**3.2 Program dan Kegiatan**

❖ Visi

*"Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan "*

❖ **Misi**

1. Mewujudkan biokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Untuk meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merujuk pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai rumusan program dan kegiatan :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat untuk memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.
2. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB), antar golongan dan etnis untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai.
3. Menjalin kerjasama infrastuktur dan suprastruktur politik, partisipasi dan kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan dan pemuda dalam rangka turut serta membelah dan mempertahankan persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
6. Menumbuhkan mekanisme kerja kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditopang oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang optimal dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis.

7. Sarana dan prasarana perkantoran untuk pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.
8. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

❖ Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.	HUT RI Sosialisasi GRNM Konsensus Bela Negara FPK	Rp 2.623.997.572,-
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Presentase Kualitas Demokrasi	Banpol Evaluasi Jaring Aspirasi Kajian Kesiap-siagaan Pemilu 2024 Pokja IDI Sosialisasi Pemahaman Demokrasi Monev Database Parpol	Rp 10.633.774.885,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya	Tim Terpadu Pengawasan	Rp 1.376.751.745,-

	Organisasi Kemasayrakan	memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.	Ormas Pendaftaran dan Pelaporan Ormas	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.	FKUB P4GN	Rp 95.617.782,-
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	Pembinaan Kantramtibmas di Kalangan Masyarakat Pencegahan Paham Radikalisme Penanganan Konflik Sosial Inventaris Data Potensi Konflik Monitoring Orang Asing Forkompinda	Rp 468.033.210,-

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

<b>URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI DANA (Rp)</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>200,000,000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,100,000,000</b>
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5,000,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>400,000,000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160,000,000
<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,008,000,000</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	300,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,200,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500,000,000</b>

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	300,000,000
Pengadaan Mebel	200,000,000
<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>485,000,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>375,000,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>4,130,000,000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3,830,000,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200,000,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100,000,000
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>4,300,000,000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,100,000,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250,000,000
Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	950,000,000
<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasayrakan</b>	<b>5,175,000,000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5,100,000,000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75,000,000
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>500,000,000</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500,000,000
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial</b>	<b>1,750,000,000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500,000,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550,000,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200,000,000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	500,000,000
<b>J U M L A H</b>	<b>24,923,000,000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2024 adalah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan rencana strategis untuk pencapaian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk kegiatan 1 (satu) tahun, sehingga apa yang diprogramkan dapat terwujud dan mencapai tujuan serta sasaran yang disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Maluku dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Kedepan

Dengan dirumuskannya rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang telah memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku dengan memperhatikan potensi, peluang, hambatan, ancaman dan kekuatan yang ada atau yang mungkin muncul disaat berjalannya kegiatan tersebut.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2024, maka penetapan skala prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran visi dan misi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan antar sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku maupun dengan OPD yang melaksanakan fungsi lain. Dan berharap adanya rencana kerja ini juga dapat memberikan peningkatan pelayanan, kualitas dan kuantitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari dalam menyusun rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dari semua sisi. Untuk itu demi penyempurnaan dalam menyusun rencana kerja pada tahun depan, kami mohon akan saran, masukan dan kritikan sehingga terwujudnya dan tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku dan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ambon, 31 Maret 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI MALUKU**



**DANIEL EDUARD INDEY, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 198902 1 002